



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LM.HUSEIN TALI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 450217

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.360.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
2. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 1.148 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/214 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
6. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, WARISAN Rp. 165.000.000
7. Tanah Seluas 10.105 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
8. Tanah Seluas 11.180 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
9. Tanah Seluas 9.601 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **66.000.000**



1. MOTOR, HONDA SPD MTR SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SM SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000
3. MOBIL, HONDA MICRO/MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG KIJANG KF 40 Tahun 1992, HASIL
SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	851.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.773.194
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.309.273.194

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.309.273.194

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.